

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA LHOKSEUMAWA

Saidah¹, Saharuddin² dan Irfan³

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan STIE Lhokseumawe

² Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Malikussaleh

ABSTRACT

This study aims to Determine the effect of government spending Sector Education and Health Sector Against Human Development Index In the city of Lhokseumawe. Data are Obtained from BPS Kota Lhokseumawe with the time period 2002-2015. The method used for the data analysis is linear regression. Results of the study are: There Effect of Government Spending Against Health Sector Human Development Index and there Effect of Government Spending Education Sector Against Human Development Index. Based on the result, the authors recommend further research can be done by adding the data and other macroeconomic variables that satisfactory results, so as to have an influence on the Human Development Index

Keywords: *Human Development Index, Government Spending And Education Sector Health Sector*

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menciptakan pembangunan yang berkesinambungan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah Negara dengan tujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan Sumber Daya Manusia mencakup peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kapasitas dasar menurut Todaro (2003) yang sekaligus merupakan tiga nilai pokok keberhasilan

pembangunan ekonomi adalah kecukupan (*sustenance*), jati diri (*selfsteem*), serta kebebasan (*freedom*). Kecukupan dalam hal ini merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (UNDP, 1990). Pada prinsipnya tujuan dasar dari adanya pembangunan ini yaitu dengan memperbanyak pilihan kepada

penduduk dimana pilihan-pilihan ini tidak terbatas dan dapat berubah kapan saja, sehingga penduduk bisa memperoleh akses yang lebih besar terhadap pengetahuan dan pendidikan, nutrisi dan pelayanan kesehatan yang lebih baik, mata pencaharian yang aman, dan sebagainya. Hal ini bisa dikatakan bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang dapat memungkinkan orang-orang menikmati hidup yang panjang, sehat dan kreatif (Haq, 1998).

Elemen-elemen pembangunan manusia secara tegas menggaris bawahi sasaran yang ingin dicapai, yaitu hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dan dapat menikmati hidup secara layak. Ini berarti pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat. Karena itu, manusia merupakan sentral dari proses pembangunan tersebut (Nagib, 2008).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia, dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam menyebabkan tingkat

pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan (Ananta, 2013).

Menempatkan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan diharapkan dapat menciptakan peluang-peluang yang secara langsung menyumbang upaya memperluas dan meningkatkan kemampuan manusia dan kualitas kehidupan mereka, antara lain melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar dan jaminan sosial (Sen, 1999). Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantaranya investasi pada sector pendidikan dan kesehatan yang diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Usmaliadanti, 2011).

Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia.

Salah satu bukti keseriusan pemerintah tersebut adalah lewat pengeluaran pemerintah yang merupakan cerminan bukti konkrit peran pemerintah dalam mengatur perekonomian. Sektor pengeluaran pemerintah yang cukup penting dan berpengaruh terhadap pembangunan manusia adalah pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan (Usmaliadanti, 2011).

Di Indonesia masalah pembangunan manusia menarik untuk dibicarakan. Isu pembangunan manusia merupakan isu sentral yang memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada pertumbuhan, pengembangan sumber daya manusia dan kebutuhan dasar. Sejak disepakatinya Millenium Development Goals (MDG's) oleh pemimpin dunia dalam KTT 2000, MDG's merupakan komitmen masyarakat internasional, khususnya negara berkembang terhadap visi pembangunan. Visi ini menempatkan pembangunan sosial dan ekonomi secara sustainable (berkelanjutan).

Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, yaitu: (1) Peran Stabilisasi, pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakankebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapa terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki

suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan (Putra, 2015).

Dengan adanya Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Dalam penelitian ini realisasi APBD yang digunakan hanya dibatasi pada variabel pengeluaran pemerintah Sesuai dengan teori IPM, yang menekankan pentingnya peran pemerintah didalam kedua sector tersebut. Pemerintah harus mengalokasikan 20% untuk sektor pendidikan dan 10% untuk sektor kesehatan dari total APBN maupun APBD sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 49 tentang pendidikan dan UU No. 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan.

Fungsi dasar dari kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin kebutuhan dasar masyarakat, atas dasar itulah syarat penentu keberhasilan ekonomi adalah membaiknya kualitas kehidupan seluruh lapisan masyarakat (Ginting, 2008). Pemerintah pusat sebagai pemangku

kepemimpinan Negara Indonesia tentunya harus bertanggung jawab atas hal tersebut, di mana pembangunan merupakan pemicu dan pemacu dari pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah, namun tentunya juga jika dilaksanakan secara adil dan merata di semua wilayah di Indonesia.

Selain itu Indonesia juga menghadapi masalah lainnya yaitu rendahnya tingkat pembangunan manusia, hal ini merupakan masalah yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata bagi semua masyarakat Indonesia. Rendahnya pembangunan manusia dapat dilihat dari Human Development Index (HDI) atau yang lebih dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Pencapaian pembangunan manusia dalam suatu Negara mencakup tiga dimensi pembangunan manusia yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak dapat digambarkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara dimana pembangunan suatu negara tidak bisa dikatakan berhasil apabila hanya melihat dari besarnya pendapatan domestik

bruto saja tanpa meningkatkan pembangunan manusianya. Sering kali tingginya pendapatan domestik bruto suatu negara tidak diimbangi dengan tingkat pembangunan manusia yang sejalan pula. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh kesenjangan tingkat

ekonomi masing-masing kelompok masyarakat.

Dengan adanya HDI tidak berarti mengesampingkan peran Gross Domestic Bruto sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara namun merupakan sebuah tantangan bagi setiap negara untuk menerjemahkan GDP tersebut ke dalam pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia

dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan Investasi pada sector ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting

dalam upaya penanggulangan kemiskinan

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam, pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif.

Dalam hal ini modal manusia dapat mengacu pada pendidikan dan juga kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Menurut Meier dan Rauch (dalam Aloysius Gunadi Brata, 2002) pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.

Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006). Selain itu rumah

tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin (Ginting, 2008).

Indonesia sebagai Negara dengan luas wilayah yang besar serta jumlah penduduk yang besar ternyata memiliki nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang semakin jatuh dalam peringkat dunia. Penyebab dari jatuhnya peringkat Indonesia yang kini menduduki peringkat 108 dari 177 negara yang ada di dunia dengan tingkat pembangunan manusia Indonesia berkisar pada 47-76 (publikasi UNDP, tahun 2008) adalah rendahnya mutu pendidikan dan kesehatan yang terdapat di Negara Indonesia. Laju indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tidak secepat pertumbuhan ekonomi. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk.

Selain itu kemiskinan merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi pemerintah yang mempengaruhi pembangunan manusia di Kota Lhokseumawe. Tingkat

kemiskinan yang tinggi membuat individu tidak mempunyai alokasi dana dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya salah satunya yang berhubungan dengan proses pembangunan manusia. Masalah kemiskinan merupakan hal penting yang perlu ditangani pemerintah daerah Kota Lhokseumawe.

Perkembangan IPM Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2004-2011 membaik, IPM Provinsi Aceh tahun 2011 mencapai 72,16 masih dibawah rata-rata IPM nasional (72,77), dengan ranking IPM Provinsi Aceh tahun 2011 menduduki peringkat ke 18 secara nasional setelah Jawa Timur dan peringkat ke 9 di Pulau Sumatera setelah Jambi. Perbandingan IPM antar kabupaten/kota tahun 2011, IPM tertinggi adalah Kota Banda Aceh dan menduduki peringkat ke-22 secara nasional, dan IPM terendah adalah Kabupaten Gayo Lues yaitu 67,86 dan berada diperingkat ke-411 secara nasional. (bps.go.id/)

B. Landasan Teori

1. Pengeluaran Pemerintah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran

pembangunan maksudnya adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik (Putra, 2015).

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang yaitu suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan

pengeluaran ($G = T$). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan ($G < T$). Sedangkan anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan ($G > T$). Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya (Ananta, 2013).

2. Jenis Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah terdiri dari:

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset

negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Ananta, 2013).

Anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Besarnya dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran. Kenaikan pengeluaran pemerintah biasanya dari pos belanja pegawai yang dialokasikan untuk menaikkan gaji pegawai dan pensiunan. Selain itu, juga terjadi pada pos pembayaran bunga utang luar negeri dan dalam negeri. Perbedaan karakteristik yang paling mendasar antara pinjaman dalam dan luar negeri yaitu pada saat implikasi di saat pengembalian (Ananta, 2013).

Dalam kasus pinjaman dalam negeri, pembayaran bunga utang oleh pemerintah akan kembali dinikmati oleh masyarakat Indonesia karena terjadi transfer pendapatan oleh kelompok masyarakat yang membayar pajak kepada kelompok masyarakat yang menjadi kreditur. Sedangkan dalam kasus pinjaman luar negeri, terjadi aliran dampak ekonomi (*multiplier effect*) yang berbeda. Pihak-pihak yang menerima pengembalian pinjaman adalah pihak kreditur di luar negeri (Ananta, 2013).

Jumlah utang luar negeri yang semakin besar menyebabkan anggaran yang digunakan untuk membayar bunga utang juga semakin meningkat. Meningkatnya jumlah pembayaran bunga utang tersebut selain disebabkan oleh membengkaknya jumlah utang jatuh tempo juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Selain pengeluaran untuk belanja pegawai dan pembayaran bunga utang, pos lain yang menarik adalah pengeluaran pemerintah untuk berbagai subsidi. Satu pos diantaranya yang berperan cukup besar adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi ini muncul pada tahun 1997/1998 sebagai akibat dari melonjaknya harga minyak mentah di pasar dunia menyebabkan meningkatnya biaya pengadaan BBM sehingga melebihi hasil penjualan BBM itu sendiri. Akibatnya pemerintah terpaksa memberikan subsidi terutama terhadap minyak tanah dan solar. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan kementerian atau lembaga negara non kementerian dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap (Ananta, 2013).

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat

dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin (Suminto, 2004).

Sehubungan dengan hal tersebut formulasi distribusi dan alokasi dari penentuan besarnya pengeluaran memegang peranan penting dalam pencapaian target kebijaksanaan fiskal. Di samping itu, pengelolaan anggaran pembangunan juga harus tetap di tempatkan sebagai bagian yang utuh dari upaya menciptakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat melalui upaya mengurangi secara bertahap peran pembiayaan yang bersumber dari luar negeri tanpa mengurangi upaya menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan (Ananta, 2013).

Pengeluaran pembangunan dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pembiayaan pembangunan rupiah dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk pinjaman program. Pengelolaan dana

tersebut akan dialokasikan kepada kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian di tingkat pusat termasuk Kementerian Hankam dan pemerintah daerah yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola instansi pusat dan dana pembangunan yang dikelola daerah (Basri, 2002).

Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dana dalam negeri maka pembiayaan proyek masih tetap dibutuhkan. Pembiayaan proyek bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek dan dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung program jaringan pengaman sosial, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan dibidang pertanian, tenaga listrik dan pengairan. Di samping itu juga dilakukan pengadaan prasarana pendukung Hankam, Telekomunikasi dan pembangunan prasarana perkotaan (Basri, 2002). Sebagaimana diamanatkan oleh UU No.17 Tahun 2003, maka system penganggaran mengacu pada praktek-praktek yang berlaku secara internasional. Menurut *GFS (Government Financial Statistics) Manual 2001*, system penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem *unified budget*, dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan, sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Sejak Tahun 2005 mulai ditetapkan penyatuan anggaran antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta pengklasifikasian

anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, organisasi dan fungsi (Ananta, 2013).

Dengan berbagai perubahan dan penyesuaian format dan struktur belanja Negara yang baru, maka belanja negara menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) terdiri dari (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang, (iii) belanja modal, (iv) pembayaran bunga utang, (v) subsidi, (vi) hibah, (vii) bantuan sosial, dan (viii) belanja lainlain. Sedangkan belanja untuk daerah, sebagaimana yang berlaku selama ini terdiri dari (i) dana perimbangan, dan (ii) dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dengan adanya perubahan format dan struktur belanja negara menurut jenis belanja maka secara otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan (*unified budget*) (Suminto, 2004).

Beberapa pengertian dasar terhadap komponen-komponen penting dalam belanja tersebut antara lain (Suminto, 2004):

1. Belanja pegawai menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, tunjangan khusus dan belanja pegawai, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan (kontribusi sosial). Dalam klasifikasi tersebut termasuk pula belanja gaji/upah proyek yang selama ini diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan. Dengan format ini, maka akan terlihat pos yang tumpang tindih antara belanja pegawai yang diklasifikasikan sebagai rutin dan pembangunan. Di

sinilah nantinya efisiensi akan bisa diraih.

2. Belanja barang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan asset negara. Demikian juga sebaliknya sering diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan.
3. Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). Pos belanja modal dirinci atas (i) belanja modal asset tetap/fisik, dan (ii) belanja modal asset lainnya/non-fisik. Dalam prakteknya selama ini belanja lainnya nonfisik secara mayoritas terdiri dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang tidak terkait langsung dengan investasi untuk pembangunan.
4. Subsidi menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membayar beban subsidi atas komoditas vital dan strategis tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam rangka menjaga stabilitas harga agar dapat terjangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat. Subsidi tersebut dialokasikan melalui perusahaan negara dan perusahaan swasta.
5. Selama ini ada jenis subsidi yang sebetulnya tidak ada unsur subsidinya, maka belanja tersebut akan dikelompokkan sebagai bantuan sosial. Bantuan social menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan sebagai

transfer uang/barang yang diberikan kepada penduduk, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, misalnya transfer untuk pembayaran dana kompensasi sosial.

6. Belanja untuk daerah menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

3. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dengan IPM

Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi pengeluaran pada sektor kesehatan dan pendidikan, pemerataan tingkat pendapatan serta penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari angka IPM. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan.

Manusia dalam perannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan (Putra, 2015).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ada disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 persen anggaran untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedinasan. Jadi, anggaran pendidikan yang dimaksud di sini adalah termasuk kategori anggaran pembangunan karena tidak termasuk di dalamnya anggaran rutin yang berupa gaji dan lain-lain. Sedangkan untuk masalah kesehatan merupakan

kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya (Putra, 2015).

Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada IPM (Putra, 2015).

C. Metode Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa data time series 2002-2015. Sumber data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh Kota Lhokseumawe. Selain itu, data lainnya yang mendukung penelitian ini diperoleh dari sumber bacaan seperti jurnal, artikel, dan buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (*library search*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan - tulisan ilmiah dan laporan-

laporan penelitian ilmiah yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pencatatan langsung berupa data seri waktu (time series) dalam kurun waktu 14 tahun (2002-2015).

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 2010). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006).

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Lhokseumawe. Data diolah dengan bantuan Eviews 8. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 2010). Ada dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_i$$

Dimana:

Y = Indeks Pembangunan Manusia
X₁ = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
X₂ = Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
a = konstanta
b₁-b₂ = koefisien regresi
e_i = *error term*

D. Pembahasan

Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, maka digunakan beberapa pengujian yaitu uji F dan uji t.

1. Uji F (Uji Simultan)

Pengujian secara simultan dilakukan dengan menggunakan statistik uji F. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen secara bersama-sama.

Uji secara serentak (secara bersama-sama) signifikan karena diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $10.91407 > 3,98$, maka hipotesis menyatakan menerima H_a dalam artian secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Uji t (Uji Parsial)

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara

individual. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa berdasarkan Tabel 4.3 untuk Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_1) diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $-2.24 < 2.201$ dengan nilai p-value sebesar 0.0467. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi $> \alpha = 0,05$, maka hipotesis menyatakan menerima H_0 dan menolak H_1 yang berarti bahwa secara parsial tidak ada pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_1) terhadap IPM (Y) Di Kota Lhokseumawe.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_2) diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $4.142683 > 2.20099$ dengan nilai p-value sebesar 0.0016 jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi $< \alpha = 0,10\%$, maka menerima H_1 dan tolak H_0 yang berarti secara parsial ada Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Meier, et al (Winarti, 2014: 41) bahwa tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil

dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut. Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara dengan memberikan dua faktor yaitu; pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia (Khusaini dalam Syam, 2014: 21). Hasibuan (1996: 133) peningkatan efisiensi, khususnya efisiensi masyarakat dengan cara meningkatkan investasi di sektor pendidikan, sehingga terdapat keseimbangan yang lebih serasi antara investasi bagi sumber daya manusia dan investasi bagi modal fisik.

E. Kesimpulan

1. Tidak Terdapat Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dilihat dari nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $-2.239953 < 2.20099$ dengan nilai p-value sebesar 0.0467. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi $> \alpha = 0,05$, maka hipotesis menyatakan menerima H_0 dan menolak H_1 yang berarti bahwa secara parsial terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_1) terhadap IPM (Y) Di Kota Lhokseumawe.
2. Pengaruh . Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $4.142683 > 2.20099$ dengan nilai p-value sebesar 0.0016 jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat

signifikansi $< \alpha = 0,10\%$, maka menerima H_1 dan tolak H_0 .

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat dari nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $10.91407 > 3,59$, maka hipotesis menyatakan menerima H_a dalam artian secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan.

F. Daftar Pustaka

- Ananta, Prayudha. 2013. Determinan Pembangunan Manusia Provinsi Lampung. Tesis. FEB Universitas Lampung.
- Basri, F. 2002. Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Erlangga. Jakarta
- Bappenas, BPS, UNDP, 2004, "Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004, Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan pembangunan Manusia Di Indonesia", Bappenas, BPS, UNDP. Jakarta
- Brata, Aloysius Gunadi. 2005. Investasi Sektor Publik Lokal Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan. Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, Charisma Kuriata, Lubis, Mahalli, 2008. Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. Makro Ekonomi Edisi Keenam. Erlangga. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 1997, Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan, Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Mulyaningsih, Yani. 2006. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. Abstrak Skripsi. www.digilib.ui.ac.id.
- Nasution, Syahrir H & H.B Tarmizi, 2006. Teori Ekonomi Mikro, Medan : USU Press.
- Nagib, Laila. 2008. Pengembangan Sumber Daya Manusia : di antara peluang dan tantangan. Jakarta: LIPI Press.
- Nurkse, Ragnar. 1964. Masalah Pembentukan Modal di Negara-negara yang sedang membangun terjemahan Hutagalung. Jakarta : Bhatara.
- Putra, Adi Dwi. 2015. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. FEB Universitas Lampung.
- Sukirno, Sadono, 2006, Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan, cetakan ketiga, Penerbit Kencana, Jakarta.

- Sukirno, Sadono, 2000. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suminto. 2004. Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara. Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen Anggaran Departemen Keuangan). Jakarta.
- Sekaran, uma dan Roger Bougie. 2010. Edisi 5, Research Method ForBusiness: A Skill Building Approach. John Wiley @ Sons, New York.
- Sen, A.K. 1999. Development as Freedom. New York: Oxford University Press.
- Tambunan, Tulus. 2001. Transformasi Ekonomi di Indonesia Teori dan Penemuan Empiris. Jakarta: Salemba Empat.
- Tedy Herlambang, dkk, 2001 Ekonomi Makro Teori, Analisis Dan Kebijakan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Todaro, Michael P. 2003. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- UNDP. 1966. Human Development Report. New York : United Nation.
- UNDP. 1996,. Human Development Report. New York : Oxford Univesity Press
- UI Haq, Mahbub. 1998. Reflections on Human Development. Oxford. CUP.
- Usmaliadanti, Christina. 2011. Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sekor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009. FE Universitas Diponegoro. Semarang.
- Patta, Devianti. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010. FE Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Putri, Citra Afnovinsa. 2014. Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, sektor pendidikan dan jumlah penduduk miskin terhadap IPM di Provinsi Lampung. FEB Universitas Lampung.

www.worldbank.org

bps.go.id/

